



RENJA 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KAB. FLORES TIMUR
JALAN JENDERAL SUDIRMAN
KELURAHAN WERI
TELP. (0383) 21039
L A R A N T U K A

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, bimbingan dan penyertaan-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Flores Timur.

Perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat mesti dilakukan secara sistematis dan terencana maka pemerintah daerah lewat organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2025 dimaksud disusun dengan tetap mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan tentang perencanaan pembangunan dan sebagai bahan informasi target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2025.

Demikian Renja ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta.

Larantuka, Juli 2024
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

ACHMAD R. DULI,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196505161992031008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I : Pendahuluan		3
1. Latar Belakang	4
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		8
1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.....		8
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		20
3. Isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		22
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....		23
5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....		45
BAB. III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....		48
1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional		48
2. Tujuan dan sasaran Renja PD		49
3. Program dan Kegiatan		50
BAB. IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....		63
BAB. V : Penutup.....		84



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2025, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

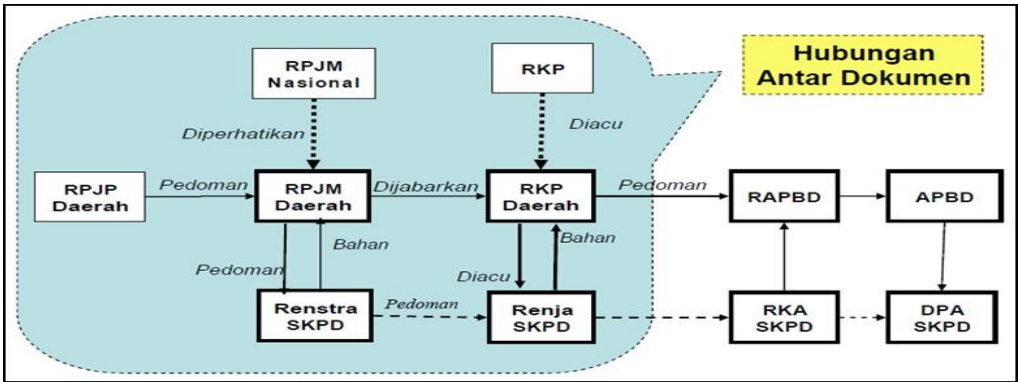
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Perhubungan Tahun 2023-2026, untuk periode 3 (tiga) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Renja PD Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Proses penyusunan Renja dan hubungan dengan dokumen lainnya.



Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2025 yang merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah urusan perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2025 maka perlu dilakukanya evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan realisasi Renja Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Sampai Akhir Periode 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Tingkat Realisasi (%) 2023		Realisasi capaian Program & Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	3	8=7/6x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A										
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	50						
		Tersedianya sarana Prasarana Aparatur (%)	100	74						
		Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya (orang)								
		PNS yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur (orang)	2							

		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan keuangan OPD (dokumen)</i>	55	33						
01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	55	33						
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	55	33						
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	40	24						
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)</i>	-	-						
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (orang/bulan)</i>	40	24						
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur(orang)</i>								
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)</i>								
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana aparatur</i>	66.008	4.926						

2.15.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>	68	42						
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	<i>Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)</i>								
		<i>Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)</i>								
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan(jenis)</i>	100	52						
		<i>Jumlah ATK yang disediakan (jenis)</i>	160	96						
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>tersedianya barang cetak dan pengadaan(lembar)</i>	64.100	3.840						
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah makan dan minuman(porsi)</i>	1.500	900						
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)</i>	80	48						
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana aparatur</i>	12	2						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	16	2						
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)</i>	613	389						
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah jasa surat menyurat (kali)</i>	500	300						

2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)</i>	60	36						
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang/bulan)</i>	3.180	636						
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana aparatur</i>	8	19						
01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (unit)</i>	7	18						
		<i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara(unit)</i>	-	-						
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara(unit)</i>	1	1						
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	<i>Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)</i>								
2.15.2	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik(%)</i>	99							
		<i>Persentase peningkatan pelayanan angkutan(%)</i>	100	100						

		<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana perhubungan(%)</i>	100							
		<i>Persentase fasilitas pemenuhan perlengkapan jalan(%)</i>	95							
		<i>Persentase angkutan umum laik jalan(%)</i>	95							
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan</i>	100							
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	<i>Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan (unit)</i>	44							
		<i>Jumlah lampu penerangan jalan umum yang diadakan (unit)</i>	180							
		<i>Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang</i>								
		<i>Jumlah pembatas jalan yang diadakan</i>								
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C									
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Pendukung Utama	<i>Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara(unit)</i>	1.500	195						

	dan Penunjang)	<i>Jumlah terminal yang dipelihara/direhabilitasi(unit)</i>	5	2						
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Angkutan Umum Laik Jalan(%)</i>	3.045							
2.15.02.2.03.04	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Frekwensi pengujian kendaraan angkutan umum (kali)</i>	3.045							
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota Dalam 1 (satua0 DaerahKabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan(%)</i>	25	5						
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	25	5						
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dan trayek lintas daerah kabupaten/kota	<i>Persentase peningkatan pelayanan angkutan(%)</i>	240	-						

2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan yang dikeluarkan (dokumen)</i>	240							
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah frekwensi koordinasi (kali)</i>	30							
2.15.02.2.16.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</i>	51	36						
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	<i>jumlah dokumen data base bidang perhubungan (dokumen)</i>	2	1						
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayanan	<i>Prosentase Pengelolaan Penyeberangan</i>	53	36						

2.15.03.2.06	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota		51	36						
	pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal dalam daerah kabupaten kota yang terletak pada jaringan jalankabupaten kota dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten dalam daerah kabupaten kota	<i>jumlah frekwensi pemeriksaan dan pengawasan armada angkutan laut (kali)</i>	51	36						
2.15.03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pembangunan penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal(laporan)	2	2						
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	<i>Jumlah Pelabuhan / terminal pelayanan angkutan sunagai danau dan penyeberangan yang dioperasi dan dipelihara (pelabuhan)</i>	2	2						

2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100		100	100	100	100	100	100%
		<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100		100	100	100	100	100	100%
		<i>Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi</i>	100		100	100	100	100	100	100%
		<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100		100	100	100	100	100	100%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8		2	2	1	2	6	75%
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	8		2	2	1	2	2	25%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	15		6	6	1	6	3	20%

2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	16		4	4	1	4	4	25%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14		14	14	1	14	14	100%
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	36						12	33%
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12		12	12	1	12		0%
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2		2	2	1	2		0%
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	8		2	2	1	2	2	25%
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	18						6	33%

2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	18						6	33%
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	18						6	33%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1		1	1	1	1		0%
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	30						12	40%
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	36						12	33%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4		2	2	1	2		0%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-							
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	20		5	5	1	5	5	25%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4		1	1	1	1	1	25%

2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	8		2	2	1	2	2	25%
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4		1	1	1	1	1	25%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	8		2	2	1	2	2	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1						1	100%
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	48		12	12	1	12	12	25%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	48		12	12	1	12	12	25%
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	4		1	1	1	1	1	25%
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	36						12	33%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10							0%
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4		4	4	1	4		0%
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>	1						1	100%

2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	11		1	1	1	1		0%
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	11		1	1	1	1		0%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	48		12	12	1	12	12	25%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48		12	12	1	12	1200%	25%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	48		12	12	1	12	12	25%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14		14	14	1	14	14	100%
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	20					-	20	100%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	30		10	10	1	10		0%

2.15.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1		1	1	1	1		0%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3		2	2	1	2		0%
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	52						26	50%
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8						4	50%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik</i>	32%					52%	44%	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	5		1	1	1	1	2	40%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	254		54	54	1	54	40	16%
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	2		1	1	1	1		0%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	216		60	60	1	60		0%

2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	<i>Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	10		6	6	1	6	3	30%
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	<i>Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1		1	1	1	1		0%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	4		1	1	1	1	1	25%
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12		3	3	1	3	3	25%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	6		1	1	1	1	1	17%

2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	8		2	2	1	2	2	25%
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</i>	100		100	100	1	100	100	100%
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	6		2	2	1	2	2	33%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	2							
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	48		12	12	1	12	12	25%
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1							
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan</i>	1		1	1	1	1		0%

2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	166		42	42	1	42	42	25%
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4		1	1	1	1	1	25%
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2					1	1	50%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik</i>	15,5%					30.5%	25.5%	

2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	2		2	2	1	2	2	100%
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	22		22	22	1	22	22	100%
2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal									
2.15.03.2.08.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	9		3	3	1	3		0%
2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</i>	9		3	3	1	3		0%

2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal									
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\</i>	6		2	2	1	2	2	33%
2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	6		2	2	1	2	2	33%
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	3		1	1	1	1		0%
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	22		22	22	1	22	22	100%

Dari table 2.1 diatas dapat dilibat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 indikator kinerja program, Tahun 2023 mencapai 100%. Sedangkan prakiraan realisasi tahun 2024 bisa mencapai 100%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Tahun 2023 prosentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik mencapai 100%. Sedangkan permkiraan realisasi tahun 2024 bisa mencapai 100%
3. Program Pengelolaan Pelayaran, Tahun 2023 prosentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik mencapai 100%. Sedangkan permkiraan realisasi tahun 2024 bisa mencapai 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		√	18%	23%	68%	82%	9%	0%	45%	27%	Dari 22 unit fasilitas terminal penumpang tipe C akan dibangun secara bertahap sesuai pembabakan renstra OPD
Rasio Ijin Trayek		√	2%	2%	2%	2%	0%	0%	100	100	Rasio ijin trayek angkutan umum sangat tergantung pada jumlah unit kendaraan wajib uji kir
Jumlah uji kir angkutan umum		√	59	82	100	100	79	52	100	150	Jumlah Kir kendaraan wajib uji masih terbatas di kecamatan-kecamatan di daratan Flotim mengikuti peralatan Uji yang digunakan sementara di Pulau Adonara dan Solor belum dijangkau, sehingga kedepannya harus diadakan unit Uji keliling
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten		√	5%	10%	26%	48%	3%	4%	30	50	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas masih sebatas rekayasa musiman pada perayaan atau hajatan tertentu saja namun pada proyeksi mendatang akan dilakukan penataan jaringan trayek secara permanen dalam kota larantuka dengan memanfaatkan ruas jalan yang lainnya untuk membuka akses lalu lintas angkutan umum dan pendekatan pelayanan.

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan penyelenggaraan program urusan yakni Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan / LLAJ dan Program Pengelolaan Pelayaran. Untuk indikator peningkatan Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C per tahun dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan fasilitas utama dan pendukung yang mesti tersedia di lingkungan terminal mulai dari bangunan terminal penumpang, gerbang terminal, loket, jalan lingkungan, kantin dan kios, penerangan lingkungan terminal dan lain – lain sebagainya yang berjumlah 22 unit. Sedangkan untuk indikator Rasio Ijin Trayek dan Jumlah uji kir angkutan umum saling berhubungan di mana dokumen ijin trayek merupakan dokumen ikutan kendaraan setelah lulus uji kir. Uji kir dilakukan dengan dukungan peralatan meknikal sampai terbitnya buku uji elektronik. Mengikuti keberadaan peralatan uji di Larantuka maka kegiatan ini masih terbatas dilakukan di daratan larantuka dan sekitarnya, sementara di Pulau Adonara dan Solor kedepannya akan dipikirkan dilayani oleh unit uji mobile keliling. Demikian halnya terjadi juga dengan indicator Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten juga masih direncanakan pelaksanaannya sebatas kota Larantuka dan sekitarnya.

2.3. Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

Isu – isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dirumuskan berdasarkan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi dengan memperhatikan telaahan rentra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Isu strategis transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur yang disusun pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi laut

Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana baik utama maupun pendukung dalam lingkungan pelabuhan dapat menimbulkan tidak aman dan tidak nyamannya aktivitas masyarakat dalam lingkungan pelabuhan. Disamping itu pula ketersediaan alat angkut tentu diharapkan dapat membuka akses jaringan trayek untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah terisolir sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan lewat ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. Fasilitas utama semisal adanya pelabuhan pengumpan lokal dalam skala kecil seperti jembatan tambatan perahu yang berfungsi menopang pelabuhan pengumpul lokal mesti memiliki terminal penumpang, lampu penerangan pelabuhan, kios dan kantin, kantor dan loket, ketersediaan air bersih, toilet umum dan lain-lain. Demikian pula ketersediaan alat angkut juga mesti menjamin kelaikan agar para penumpang dapat secara nyaman dan aman berada dalam pelayaran. Maka itu, alat kelengkapan keselamatan juga menjadi faktor pendukung kelaiklautan kapal disamping fisik badan kapal dan permesinan serta administrasi / dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai aspek legalitas kapal dalam melakukan kegiatan operasional di laut.

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat.

Ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan upaya rekayasa lalu lintas dan penataan jaringan trayek angkutan umum. Disamping itu pula ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pun perlu disiapkan secara baik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada setiap waktu seperti ketersediaan lampu penerangan jalan umum, pagar pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan, marka jalan dan lain-lain. Segala fasilitas tersebut perlu dibangun untuk meminimalisir terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan juga fasilitas peralatan Uji Kendaraan Bermotor juga menjadi salah satu faktor penting terkait dengan penyediaan alat angkutan umum yang laik jalan, sehingga hal tersebut pun perlu diatur secara baik untuk melayani Uji kir kendaraan angkutan umum di Kabupaten Flores Timur.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan transportasi di daerah dilakukan oleh berbagai unsur pemerintah dan lembaga serta BUMN baik itu di sector transportasi darat maupun di sector transportasi laut berdasarkan ruang kewenangan masing-masing.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2025 dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Penelaahan ini dilakukan bersama dengan Tim BP4D Kabupaten Flores Timur. Hasil review dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD 2025					CATATAN PENTING
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PERHUBUNGAN				6.490.535.500					7.085.276.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	3.809.505.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	3.729.245.500	
		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
		Prosentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				Prosentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		
		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	70.000.000	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	57.000.000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Flores Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Flores Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	22.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)</i>	2	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)</i>	2	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	3	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	3	15.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>	4	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>	4	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.105.829.915	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.205.291.500	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Flores Timur	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	14 bulan	3.035.829.915	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Flores Timur	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	14 bulan	3.135.291.500	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12	60.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12	60.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah laporan keuangan Abulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keungan bulanan / triwulan / semester SKPD (laporan)</i>	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah laporan keuangan Abulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keungan bulanan / triwulan / semester SKPD (laporan)</i>	2	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	6	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	6	5.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6	10.000.000	
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	10.000.000	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	5.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Flores Timur	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	10.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Flores Timur	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	10.000.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Flores Timur	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Flores Timur	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				131.800.000	
Penyediaan Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	5	10.000.000	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	5	4.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	5.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	16.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan Yang disediakan (Paket)</i>	2	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan Yang disediakan (Paket)</i>	2	16.800.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan(Dokumen)</i>	1	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan(Dokumen)</i>	1	1.000.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	12	20.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	12	15.000.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka,Ku pang,Jakarta, Luar Wilayah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)</i>	12	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka,Ku pang,Jakarta, Luar Wilayah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)</i>	12	60.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1	4.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	12	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	12	5.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				247.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				228.200.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Flores Timur	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Flores Timur	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	1.200.000	
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)</i>	12	35.000.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)</i>	12	20.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)</i>	12	207.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)</i>	12	207.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				106.675.085	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.954.000	

Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Flores Timur	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	14	82.900.000	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Flores Timur	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	14	31.954.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Flores Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	23.775.085	Pemeliharaan Mebel	Flores Timur	<i>Jumlah Mebel Yang dipelihara (Unit)</i>	5	10.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN				2.492.270.500					3.029.030.500	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				953.240.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				2.010.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Adonara, Adonara Tengah, Ile Boleng, Kelubagolit dan Witihama	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Yang Tersedia (Unit)</i>	85	953.240.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kec. Adonara Timur, Solor Selatan, Tanjung Bunga	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Yang Tersedia (Unit)</i>	81	2.010.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				494.030.500	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				494.030.500	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Larantuka (Terminal Weri)	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)</i>	1	494.030.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Larantuka (Terminal Weri)	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)</i>	1	494.030.500	

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				10.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				10.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Wulanggitang, Adonara Barat, Tanjung Bunga	<i>Jumlah Laporan Kordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbagunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	1	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Wulanggitang, Adonara Barat, Tanjung Bunga	<i>Jumlah Laporan Kordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbagunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	1	10.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				945.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				425.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka (Kel.Weri)	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	3	850.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka (Kel.Weri)	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	9	350.000.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Denpasar Bali, Luar Wilayah	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	2	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Denpasar Bali, Luar Wilayah	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	2	40.000.000	
Regitrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19 Kec. Kabupaten Flores timur	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)</i>	100	35.000.000	Regitrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19 Kec. Kabupaten Flores timur	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)</i>	100	25.000.000	

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)</i>	2	10.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)</i>	1	10.000.000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				40.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				40.000.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	12	40.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	12	40.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	12	20.000.000	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	12	20.000.000	

Perbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	Perbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan)</i>	10	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	10	10.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	1	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan)</i>	1	20.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				188.760.000					327.000.000	

Penerbitan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah kabupaten /Kota				35.000.000					30.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut k Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	68	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut k Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12	30.000.000	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				103.760.000	Penerbitan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah kabupaten /Kota				97.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)</i>	2	31.760.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)</i>	2	25.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota(laporan)</i>	22	72.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota(laporan)</i>	22	72.000.000	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				50.000.000	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				200.000.000	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	Adonara(Pelabuhan Deri) Solor (Pelabuhan Lohayong)	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)</i>	22	50.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	Adonara(Pelabuhan Deri) Solor (Pelabuhan Lohayong)	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)</i>	12	200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan masyarakat diperoleh dari proses pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan, hasil reses Anggota DPRD kunjungan kerja Kepala Daerah dan proposal dari masyarakat. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Perhubungan					
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Prosentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik		1.650.000.000	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota		1.650.000.000	
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Solor Selatan	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)	80 unit	1.000.000.000	Usulan musrenbang Lampu Penerangan Jalan Umum diterima
		Kecamatan Tanjung Bunga (Lamanabi) dan Kecamatan Adonara Timur (Desa Puhu)	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)	100 M	650.000.000	Usulan musrenbang Pagar Pengaman Jalan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagai RKP tahun pertama peletak dasar transformasi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 RKP 2025 mengusung tema “ *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* ” . Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 tersebut, maka pembangunan nasional diarahkan pada 8 Prioritas Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai OPD teknis pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan. Dalam penyusunan Renja diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar (2021)	Capain Tahun (2023)	Target Kinerja (2025)
	Terwujudnya daya saing infrastruktur	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)		30,5	74,5
		Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)		52	56

Untuk mencapai sasaran dari masing – masing proritas pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program – program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.5 Tersedianya Fasilitas Transportasi yang Memadai	Prosentase Sarana dan Prasarana Transportasi laut dalam kondisi baik (%)	74,5
		Prosentase Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)	56

3.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Program dan kegiatan yang akan direncanakan tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2025 terdiri dari 2 program prioritas dan 1 program penunjang, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Flores Timur terutama pekerjaan pemabngunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi seperti perlengkapan jalan (lemapu penerangan jalan umum,. Pagu indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp. 7.085.276.000, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 3.729.246.000, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp. 3.029.030.000, Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 327.000.000,- Rencana Program dan Kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut.

TABEL 3.3													
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR													
Kode		Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / SubKegiatan Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan				Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Pagu Indikatif (Rp)	
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
(1)		(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					DINAS PERHUBUNGAN								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62	3.029.030.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.367.433.550,00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.010.000.000,00				2.211.000.000,00	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	81 unit	2.010.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga, Kec. AdonaraTimur, Kec. Solor Selatan	PAJAK PENERANGAN JALAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.211.000.000,00	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			494.030.000,00				543.433.550,00	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)								
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	494.030.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	543.433.550.00	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			10.000.000,00				11.000.000,00	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00	

[illegible]

						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21.000.000,00
2	15	02	2.14		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			30.000.000,00				32.000.000,00
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21.000.000,00
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	327.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	340.000.000,00
2	15	03	2.01		<i>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</i>			30.000.000,00				31.000.000,00
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	31.000.000,00

[illegible]

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4. 1													
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025													
Kode					Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / SubKegiatan Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					DINAS PERHUBUNGAN			7.085.276.000,00					7.803.403.600,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			7.085.276.000,00					7.803.403.600,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.729.245.500,00			x) Penunjang Prioritas	4.095.970.050,00	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)		100							
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100							
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100							
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.000.000,00				65.700.000,00	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	24.200.000,00	
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	16.500.000,00	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.205.291.500,00				3.520.820.650,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.135.291.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	3.448.820,650.00
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	61.000.000,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00				21.500.000,00
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.000.000,00				49.500.000,00
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							

						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00
2	15	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			<i>131.800.000,00</i>				<i>144.980.000,00</i>
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.400.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.600.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	18.480.000,00
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.100.000,00
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	66.000.000,00

2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.400.000,00
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		228.200.000,00				250.320.000,00
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.320.000,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	227.000.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		41.954.000,00				46.149.000,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	31.954.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.149.400,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62	3.029.030.500,00	3.029.030.500,00	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.367.433.550,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		2.010.000.000,00				2.211.000.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						

						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	81 unit	2.010.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga, Kec. AdonaraTimur, Kec. Solor Selatan	PAJAK PENERANGAN JALAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2..211.000.000,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			494.030.500,00				543.433.000,00
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)							
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	494.030.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	543.433.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			10.000.000,00				11.000.000,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, KecamatanLarantuka,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			425.000.000,00				508.000.000,00
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 unit	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	420.000.000,00
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	40.000.000,00	Denpasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	51.000.000,00
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor							

						Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	26.000.000,00
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	02	2.06		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>			40.000.000,00				41.000.000,00
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kec. Adonara Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	41.000.000,00
2	15	02	2.09		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			20.000.000,00				21.000.000,00
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21.000.000,00
2	15	02	2.14		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			30.000.000,00				32.000.000,00
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota							

					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21.000.000,00
--	--	--	--	--	--	-----------	---------------	--	--------------------------------------	--	---------------

2	15	02	2.14	0003	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	327.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	340.000.000,00
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				31.000.000,00
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	31.000.000,00
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			97.000.000,00				99.000.000,00
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota							

[illegible]

BAB V

PENUTUP

RENJA Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2025. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, anatr- ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing – masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2025 melalui pelaksanaan program, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akun tabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah untuk menjadikan RENJA Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pernbangunannya,
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegintan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana aloknsi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah (APBD) Tahun 2025, serta kesesuaiannya dengnn ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnan;
- 3 . Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur wajib melaku.kan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secaraberkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, dengan mohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam pelaksanaanya Renja Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Larantuka, Juli 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

ACHMAD R. DULI,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196505161992031008